



**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Akuntansi (SI)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

**Oleh:**

**Anis Nurlaili  
080810391129**

**JURUSAN S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2014**



**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Akuntansi (SI)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

**Oleh:**

**Anis Nurlaili  
080810391129**

**JURUSAN S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul : PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN TERHADAP KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat  
Daerah (SKPD) Kabupaten Jember)

Nama Mahasiswa : Anis Nur Laili  
NIM : 080810391129  
Jurusan : S1-Akuntansi  
Tanggal Persetujuan : 23 April 2014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Rocman Effendi, SE, M. Si, Ak  
NIP. 19710217 200003 1 001

Taufik Kurrohman SE, M.SA, Ak  
NIP. 19820723 200501 1 002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1- Akuntansi

Dr.Mohammd Miqdad,SE,MM,Ak  
NIP. 19720416 200112 1 001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Nur Laili

Nim : 080810391129

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2014  
Yang menyatakan,

Anis Nurlaili  
NIM.080810391129

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Supriyadi dan ibunda Shofiyah yang telah mendoakan dan memberikan curahan kasih sayang, nasehat, dorongan serta pengorbanan selama ini;
2. Suamiku tercinta Faradizal Maulana yang telah memberikan doa dan dukungannya;
3. Kakakku, Sholihatul Farida yang telah memberikan semangat dan dukungan;
4. Guru-guruku mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan perguruan tinggi yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan penuh rasa sabar;
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember;

**MOTTO**

**”Segala sesuatu yang dikerjakan oleh bukan ahlinya maka tunggulah saat – saat kehancuran”**



**SKRIPSI**

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jember)**

**Oleh:**

**Anis Nurlaili  
080810391129**

**Pembimbing:**

Dosen Pembimbing Utama : Rochman Efendi, SE, M.Si Ak  
Dosen Pembimbing Anggota : Taufik Kurrohman SE, M.SA, Ak

**PENGESAHAN  
JUDUL SKRIPSI**

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Anis Nur Laili  
NIM : 080810391129  
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

.....

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : <u>Nur Hisamuddin, SE, M.SA, Ak</u> Nip. 19791014 200912 1 001	(.....)
2. Sekretaris : <u>Novi Wulandari, SE, M.Scc &amp; Fin, Ak</u> Nip. 19801127 200501 2 003	(.....)
3. Anggota : <u>Dr. Alwan S. Kustono, SE, M.Si, Ak</u> Nip. 19720416 200112 1 001	(.....)

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan

Dr. M. Fathorrazi, M.Si

**Anis Nur Laili**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah. Obyek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh langsung terhadap kinerja instansi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi maka semakin tinggi kinerja instansinya. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kinerja instan. (2) Sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Sehingga semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah maka akan semakin tinggi pula kinerja instansi pemerintah. Sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

**Kata Kunci** : Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kinerja Instansi Pemerintah

**Anis Nur Laili**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*

**ABSTRACT**

*The purpose of research is to obtain empirical evidence about the effect of the use of information technology and internal control of the performance of government agencies. Object of this study is regional work units (on education) Jember. The results showed that (1) the use of information technology directly influence the performance of the agency. This research found that the use of information technology has a positive effect on the performance of institutions. The higher rate of utilization of information technology, the higher the performance of the office. This indicates a positive relationship between the use of information technology with instant performance. (2) The system of internal control and the government has a significant positive effect on the performance of institutions on education. So the higher the government's system of internal control will be higher the performance of government agencies. Effective internal control system will affect the performance of local government officials.*

**Keywords** : *Utilization of Information Technology, Internal Control Systems and Government Performance*

## RINGKASAN

**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jember);** Anis Nur Laili; 080810391129; 2014; 51 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Jember menjadi hal yang penting karena hingga kini kinerja pimpinan SKPD yang berada di Kabupaten Jember kerap menjadi sorotan publik. Seharusnya, pencapaian kinerja AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) harus didasari unsur perencanaan kinerja. Tujuan kinerja dan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember menjadi perhatian pimpinan masing – masing SKPD karena hasil penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jember tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sistem yang baik ini hendaknya sejalan dengan peningkatan kinerja pemerintahan ini. Hal ini penting untuk dievaluasi untuk mengingat banyaknya peraturan tertulis yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat sampai pada kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Realisasi

dari motivasi kerja diharapkan mampu menghapus pandangan negatif masyarakat mengenai kinerja pemerintah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, unit analisis penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jember. Teknik penentuan sampel menggunakan *nonprobability sampling* berupa *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah kepala bagian/sub bagian pada unit kerja yang ada pada setiap SKPD Kabupaten Jember dan yang telah bekerja minimal satu tahun di jabatan yang sama karena sudah memiliki pengalaman dalam pekerjaan, sehingga pegawai yang dijadikan responden adalah pegawai yang sudah banyak mengerti mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi.

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh langsung terhadap kinerja instansi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi maka semakin tinggi kinerja instansinya. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kinerja instansi.

Sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi SKPD. Sehingga semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah maka akan semakin tinggi pula kinerja instansi pemerintah. Sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

## PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis Kinerja Keuangan dengan Model Altman Modifikasi pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk periode 2008-2011”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Bapak Dr. H. Moehammad Fathorrazi, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dr. Ahmad Roziq, SE, MM., Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Rochman Effendi, SE, M. Si, Ak., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Taufik Kurrohman SE, M.SA, Ak., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dalam menjalankan studi.
6. Segenap Staf Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah membantu dan memberikan kemudahan pelayanan.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi 2008 reguler sore yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.

8. Semua pihak yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas dalam penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan senang hati dan tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 23 April 2014

Penulis

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>PRAKATA</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	8
2.1.1 Pengertian Kinerja.....	8
2.1.2 Kinerja Instansi Pemerintah .....	9
2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	10
2.1.4 Sistem Pengendalian Intern.....	11

<b>2.2 Penelitian Terdahulu</b> .....	15
<b>2.3 Kerangka Konseptual Penelitian</b> .....	16
<b>2.4 Hopotesis Penelitian</b> .....	17
2.4.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah .....	17
2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah .....	18
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	20
<b>3.1 Sumber dan Metode Pengumpulan Data</b> .....	20
<b>3.2 Populasi dan Sampel</b> .....	21
<b>3.3 Definisi Operasional Variabel</b> .....	22
3.3.1 Kinerja Instansi Pemerintah .....	22
3.3.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	23
3.3.3 Sistem Pengendalian Intern .....	24
<b>3.4 Metode Analisis Data</b> .....	25
3.4.1 Metode Analisis Data .....	25
3.4.2 Pengujian Kualitas Data .....	26
3.4.3 Pengujian Asumsi Klasik .....	27
3.4.4 Analisis Kuantitatif .....	29
<b>BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	31
<b>4.1 Deskripsi Responden</b> .....	31
4.1.1 Data Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	32
4.1.2 Data Demografi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .....	33
4.1.3 Data Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	33
4.1.4 Data Demografi Responden Berdasarkan Jabatan .....	34

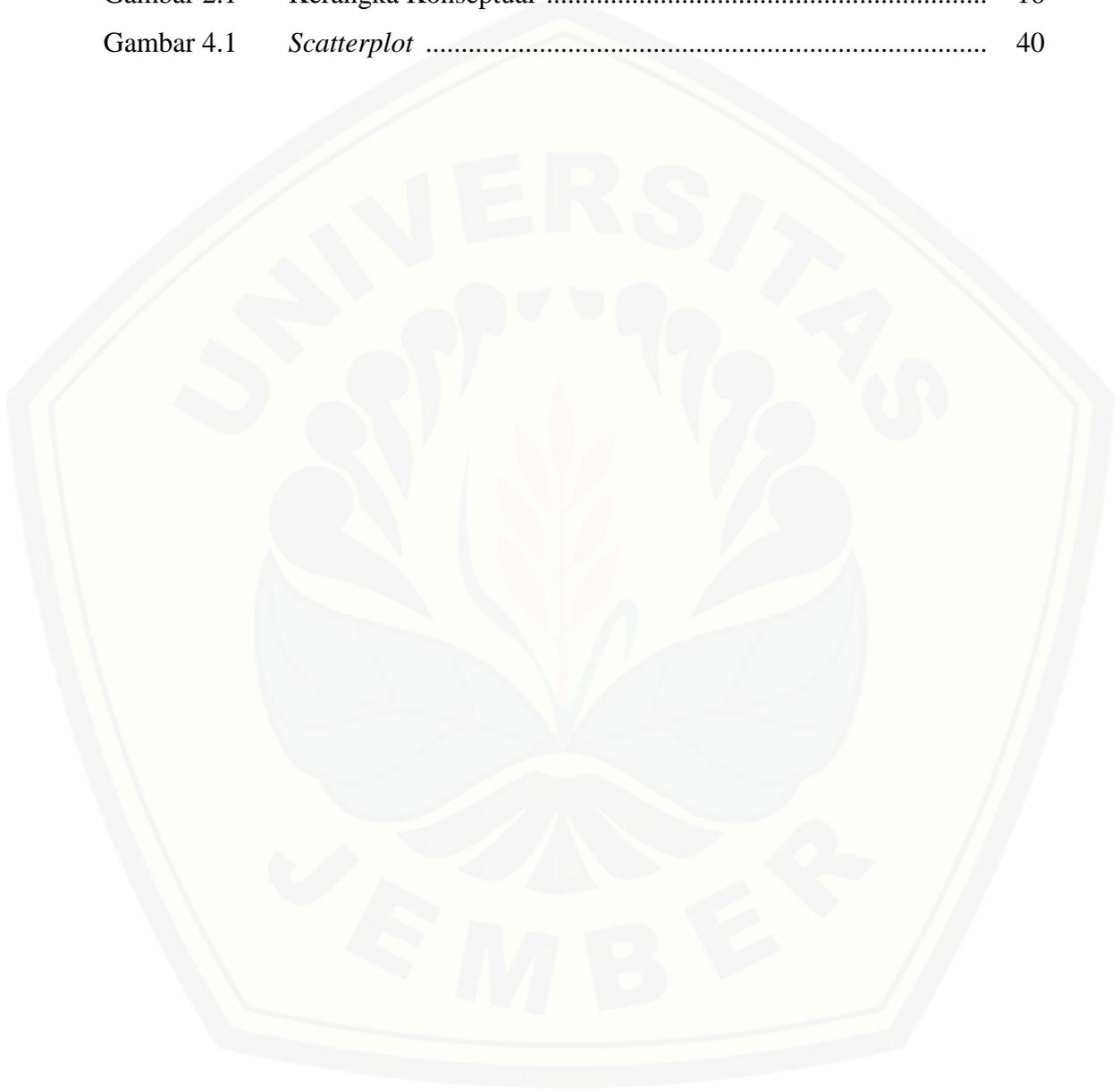
4.1.5 Data Demografi Responden Berdasarkan Masa Jabatan .....	34
<b>4.2 Analisis Data</b> .....	35
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	35
<b>4.3 Uji Kualitas Data</b> .....	36
4.3.1 Uji Validitas .....	36
4.3.2 Uji Reliabilitas .....	37
<b>4.4 Uji asumsi Klasik</b> .....	38
4.4.1 Uji Normalitas .....	38
4.4.2 Uji Multikolinieritas .....	39
4.4.3 Uji Heterokedastisitas .....	39
<b>4.5 Analisis Kuantitatif</b> .....	40
4.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda .....	40
4.5.2 Uji F ( <i>Goodness Of Fit</i> ) .....	43
4.5.3 Uji Koefisien Regresi ( $R^2$ ) .....	43
<b>4.6 Interpretasi Hasil</b> .....	44
4.6.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi .....	44
4.6.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi .....	45
<b>BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN</b> .....	47
5.1 Kesimpulan .....	47
5.2 Keterbatasan .....	47
5.2 Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	49
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember .....	21
Tabel 4.1	Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember .....	31
Tabel 4.2	Daftar Kuisisioner .....	32
Tabel 4.3	Data Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	32
Tabel 4.4	Data Demografi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .....	33
Tabel 4.5	Data Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	33
Tabel 4.6	Data Demografi Responden Berdasarkan Jabatan .....	34
Tabel 4.7	Data Demografi Responden Berdasarkan Masa Jabatan .....	34
Tabel 4.8	Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif .....	35
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Data .....	36
Tabel 4.10	Hasil Uji Reliabilitas Data .....	37
Tabel 4.11	Hasil Uji Normalitas .....	38
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinieritas .....	39
Tabel 4.13	Hasil Regresi Berganda .....	41
Tabel 4.14	Hasil Uji F .....	43
Tabel 4.15	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	44

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual .....	16
Gambar 4.1	<i>Scatterplot</i> .....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuisisioner Penelitian
Lampiran 2	Tabulasi Data Kuisisioner
Lampiran 3	Data Responden
Lampiran 4	Deskriptive Statistik
Lampiran 5	Uji Validitas Data
Lampiran 6	Uji Reliabilitas
Lampiran 7	Uji Normalitas
Lampiran 8	Uji Multikolinieritas
Lampiran 9	Uji Heterokedastisitas
Lampiran 10	Regresi Berganda
Lampiran 11	Uji F dan Uji T
Lampiran 12	Uji Koefis

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah maka penyerahan pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Menurut Mahsu (2006:25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern. Teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis *hardware*, *software*, manajemen data dan teknologi jaringan informasi (O'Brien, 2006:28). Menurut Aji (2005:6) informasi adalah data yang terolah dan sifatnya menjadi data lain yang bermanfaat dan biasa disebut informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan

oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan (Tjhai, 2003:3). Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2007) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Wilkinson *et al.* (2000). Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kas pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003), namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan struktur organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhiya kebijakan pimpinan. Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk

memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya (Rai, 2008:283). Menurut Bodnar dan William (2006:11) pengendalian intern merupakan suatu proses yang dirancang untuk menyediakan keyakinan dan efisiensi operasi perusahaan dan kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada. Proses pengendalian intern organisasi terdiri dari lima elemen yaitu : lingkungan pengendalian, pengukuran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan. Pelaksanaan sistem pengendalian intern dapat efektif apabila ada komitmen diantara pihak-pihak yang terkait dalam organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok. Dengan komitmen dan sistem pengendalian intern yang baik maka akan tercipta organisasi/perusahaan yang *economy, efficiency* dan *effectiveness* untuk menciptakan *good cooperate governance* dalam institusi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Kompyurini (2007) berpendapat bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja.

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administratif (Moscove *et al.*, 1990 dalam Triyuwono & Roekhudin, 2000). Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi antara lain (Mahmudi, 2007): (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala SKPD. Aspek-aspek dalam manajemen pembangunan daerah terwadahi dalam satu atau beberapa SKPD. Penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, pengawasan diwadahi dalam bentuk inspektorat, perencanaan diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, sedangkan aspek pelaksana urusan daerah diwadahi dalam dinas daerah. Kinerja SKPD menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bisa meliputi Badan, Dinas, Kantor dan unit lainnya.

Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Jember menjadi hal yang penting karena hingga kini kinerja pimpinan SKPD yang berada di Kabupaten Jember kerap menjadi sorotan publik. Seharusnya, pencapaian kinerja AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) harus didasari unsur perencanaan kinerja. Tujuan kinerja dan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember menjadi perhatian pimpinan masing – masing SKPD karena hasil penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jember tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sistem yang baik ini hendaknya sejalan dengan peningkatan kinerja pemerintahan ini. Hal ini penting untuk dievaluasi untuk mengingat banyaknya peraturan tertulis yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat sampai pada kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Realisasi dari motivasi kerja diharapkan mampu menghapus pandangan negatif masyarakat mengenai kinerja pemerintah.

Di pemerintahan Kabupaten Jember, pengawasan secara intern di masing-masing instansi dilakukan oleh atasan langsung dan oleh Inspektorat Kabupaten Jember dengan melakukan pemeriksaan reguler. Hasil pemeriksaan ditinjau dari Sistem Pengendalian Intern. Mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan masih ditemukan kelemahan pada bidang pengawasan terutama pengawasan atasan langsung kepada bawahan di Pemerintahan Kabupaten Jember sehingga ditemukan

penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung.

Hal ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah belum dinyatakan baik, oleh karena itu dilakukannya pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat menggambarkan bagaimana kinerja pemerintahan untuk menunjukkan pencapaian hasil yang dicapai. Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan yang terjadi sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi informasi.

Setelah dilakukannya penandatanganan kerjasama dengan PT. Telkom Pada tanggal 30 September 2013, kini Kabupaten Jember siap bertransformasi menjadi kota digital. Dengan dilaunchingnya Jember Digital Society, masyarakat akan mengenal Jember sebagai kota digital dimana seluruh potensi yang ada didalamnya diberbagai segmen akan terkoneksi secara digital dan menjadi keunggulan kompetitif bagi kota Jember. Seperti yang dikatakan oleh direktur *enterprise and business* telkom, Muhammad Awaludin mengatakan “ Jember *Digital Society* merupakan mahakarya telkom Indonesia untuk masyarakat kota Jember, dimana seluruh infrastruktur jaringan internet broadband dan aplikasi teknologi informasi yang telah kami gelar di Jember ini akan kami gunakan sebagai *enabler* untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kota ini.” Hal ini dibuktikan dengan pemasangan 1.000 titik acces point intenet WiFi (dengan brand Indonesia WiFi dan kode akses @wifi.id) yang tersebar du 213 (Indischool) dan 100 sekolah (Internet Pendidikan), pemasangan @wifi.id di beberapa publik area seperti Alun-Alun, GOR, Mandiri, Jamsostek, Johar Plasa dan Natasya Beauty. Penyediaan line dedicated access broadband (dengan brand astinet) untuk segmen pemerintahan/goverment (bagian kepegawaian, pengolahan keuangan dan aset) dan segmen pendidikan (pelaporan aset sekolah ke dinas pendidikan secara online). Melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti yang dilakukan di Jember ini, masyarakat akan semakin percaya terhadap kinerja

aparatur pemerintah daerahnya karena adanya transparansi proses (caleg-indonesia.com).

Dari uraian diatas dan berdasarkan dari penelitian terdahulu, maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul “**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jember)**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : apakah pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh serta menjadi pembanding untuk membandingkan teori dan fakta.

#### 2) Bagi Peneliti Selanjutnya

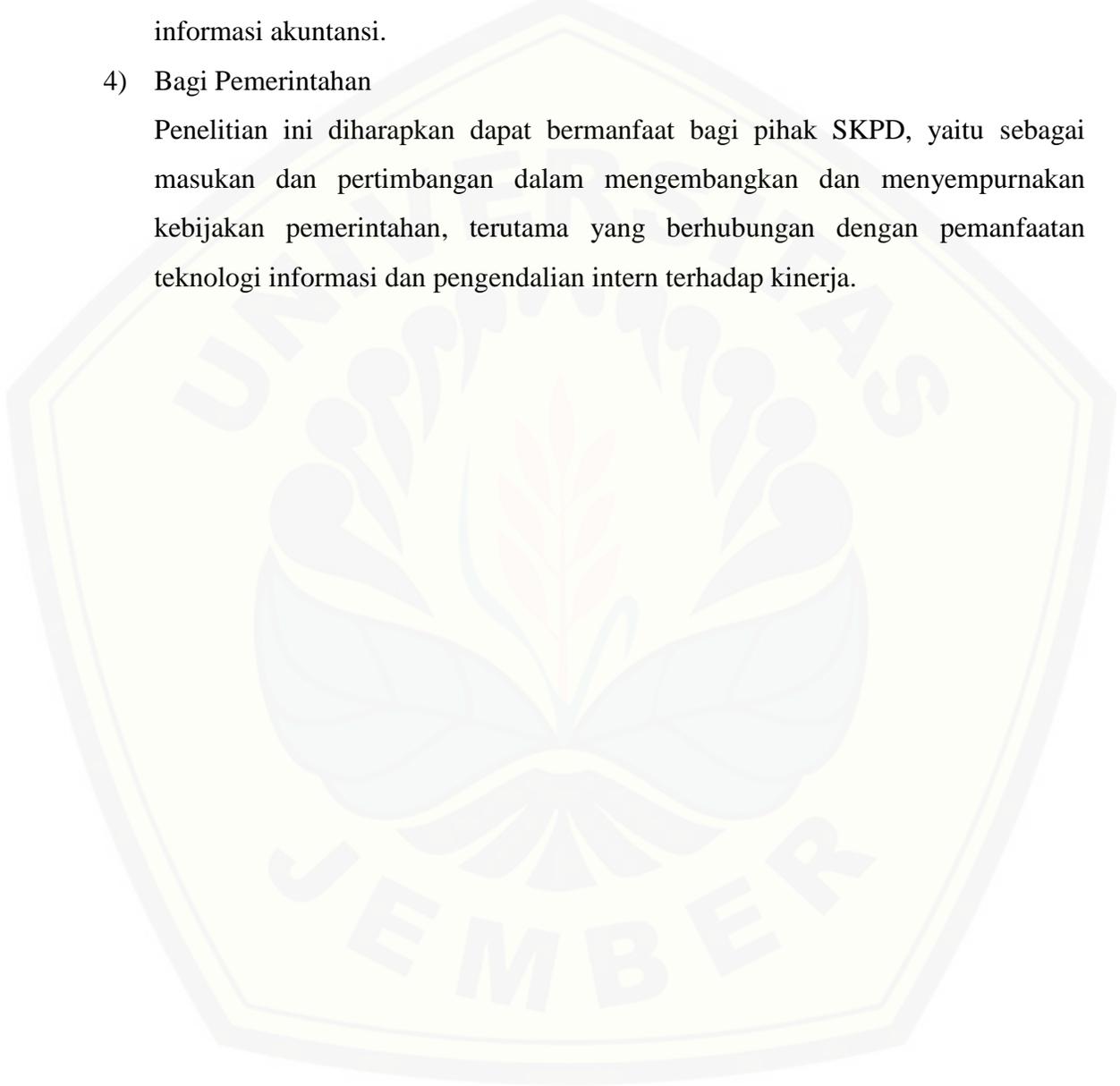
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya tentang bagaimana pengungkapan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah.

3) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi atau acuan untuk menindaklanjuti penelitian – penelitian serupa dan menambah kajian pustaka di bidang sistem informasi akuntansi.

4) Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak SKPD, yaitu sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pengertian Kinerja

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Saat ini kinerja pemerintahan lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang diperoleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap organisasi penting untuk selalu melakukan penilaian terhadap kinerja karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai input bagi perbaikan dan peningkatan kinerja dikemudian hari.

Menurut Mahsun (2006:25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu. Kinerja biasanya diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah diterapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang telah dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sementara Sinambela (2006:137) mengatakan kinerja yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral dan etika.

Menurut Widodo (2005:vii) dalam konsep birokrasi yang profesional yang berbasis kinerja menjadi sangat luas. Setidaknya bidang cakupannya meliputi aspek :

1) Kelembagaan

Aspek kelembagaan perlu dibangun agar tercapai lembaga yang efektif dan efisien dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

2) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang profesional dan kompeten merupakan salah satu faktor penentu birokrasi dalam mencapai tatanan kinerja secara optimal. Karena itu, sumber daya manusia dalam birokrasi juga perlu dibangun, dalam arti ditingkatkan kompetensinya, kompetensi ini merupakan kemampuan aparatur pemerintah berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.

3) Ketatalaksanaan

Aspek ketatalaksanaan juga perlu dibangun agar seluruh unsur lembaga dapat bekerja sesuai dengan mekanisme, prosedur dan metode yang telah ditetapkan.

4) Sumber daya keuangan dan peralatan

Sumber daya keuangan dan peralatan dalam suatu organisasi yang menjadi faktor penentu tercapainya pada tatanan optimal. Oleh karena itu sumber daya ini juga perlu dibangun untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, baik berupa uang maupun peralatan yang diperlukan dalam beroperasinya organisasi.

## 2.1.2 Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2005:274). Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai

keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik (Nordiawan, 2010:158).

Praktik pengukuran kinerja instansi pemerintah di Indonesia telah dilakukan setelah dikeluarkannya instruksi presiden No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Instruksi ini menugaskan kepada para pimpinan instansi pemerintah merumuskan suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada masing-masing instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Menanggapi instruksi ini, lembaga administrasi negara dan BPKP menyusun buku pedoman penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahapan sebagai : (1) Penetapan rencana strategik, (2) Pengukuran kinerja, (3) Pelaporan kinerja, (4) Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

### **2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat membawa dunia memasuki era baru menuntut informasi yang lebih cepat. Banyak perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis maupun pemerintahan seperti perubahan teknologi produksi, teknologi informasi dan struktur organisasi, yang mendorong organisasi untuk terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya (Supada, 2010).

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*) perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electric commerce* dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson, et al, 2000 dalam Indriasari dan Ertambang, 2008). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik

dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

#### **2.1.4 Sistem Pengendalian Intern**

Definisi pengendalian intern menurut COSO adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar dengan pencapaian tujuan dalam kategori yaitu : (a) efektivitas dan efisiensi operasi, (b) keandalan laporan keuangan, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Moeller, 2009: 32). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan adopsi dari COSO dengan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintah Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 definisi sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Afrianti (2011) pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua (Bastian dan Gatot, 2002: 204), yaitu:

a. Pengendalian intern akuntansi (*accounting internal control*)

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

b. Pengendalian intern administratif (*internal administrative control*).

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Menurut Wilkinson *et al.* (2000) dalam Indriasari dan Ertambang (2008), sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (a) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen dokumen dan catatan-catatan bernomor, (b) pemisahan tugas, (c) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi, (d) pemeriksaan independen atas kinerja, dan (e) penilaian yang tepat atas jumlah yang dicatat.

COSO mengidentifikasi sistem pengendalian internal yang efektif meliputi lima komponen yang saling berhubungan untuk mendukung pencapaian tujuan entitas, yaitu (Moeller, 2009: 33):

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah tindakan, kebijakan, prosedur yang merefleksikan seluruh sikap manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas yang mencakup : (a) integritas dan nilai etika (*integrity and ethical values*), (b) komitmen terhadap kompetensi (*commitment to competence*), (c) dewan komisaris atau komite audit (*board of directors or audit committee*), (d) filosofi dan gaya operasi manajemen (*manajement's philosophy and operating style*), (e) struktur organisasi

(*organizational structure*), (f) pemberian otoritas dan tanggung jawab (*assignment of authority and responsibility*), (g) kebijakan dan praktik sumber daya manusia (*human resource policies and practices*).

b. Penilaian Resiko (*risk assessment*)

Penilaian resiko dalam sistem pengendalian intern adalah usaha manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang relevan dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

c. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang objektif. Aktivitas pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, dokumentasi dan catatan yang cukup, pengawasan aset antara catatan dan fisik, serta pemeriksaan independen atas kinerja.

d. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)

Informasi dan komunikasi dalam pengendalian adalah metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk memelihara akuntabilitas yang berhubungan dengan aset. Transaksi-transaksi harus memuaskan dalam hal eksistensi, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, tepat waktu, serta dalam posting dan mengikhtisarkan.

e. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan kegiatan pengendalian intern secara periodik harus dipantau oleh manajemen. Pemantauan meliputi penilaian atas kualitas kerja pengendalian intern untuk menentukan apakah operasi pengendalian memerlukan modifikasi atau perbaikan.

Berdasarkan PP. 60 tahun 2008 yang dibuat berdasarkan adopsi dari COSO tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa unsur-unsur pembentuk SPIP antara lain:

## a. Lingkungan pengendalian

Indikator lingkungan pengendalian ini memiliki makna bahwa pimpinan dan staf instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui : penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi dan kepemimpinan yang kondusif. Penegakkan integritas dan nilai etika dilakukan dengan cara : menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan, dan menegakkan tindakan disiplin.

## b. Penilaian resiko

Indikator penilaian resiko ini memiliki makna bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko, melalui identifikasi resiko dan analisis resiko yang mungkin bisa terjadi. Penilaian resiko oleh pimpinan instansi pemerintah dengan cara menetapkan : tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan.

## c. Kegiatan pengendalian

Indikator kegiatan pengendalian ini memiliki makna bahwa pimpinan beserta staf instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

## d. Informasi dan komunikasi

Indikator informasi dan komunikasi ini memiliki makna bahwa pimpinan dan staf instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Pimpinan dan staf instansi pemerintah wajib menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

e. Pemantauan pengendalian intern.

Indikator pemantauan pengendalian intern ini memiliki makna bahwa sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah sudah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Nizar dan Oktari (2010) dengan judul pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah (studi pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar), menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah sedangkan pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Tugiman (2000) dengan judul pengaruh manajemen puncak, peran auditor internal serta faktor-faktor pendukungnya terhadap peningkatan pengendalian intern dan kinerja perusahaan, didapatkan bukti empiris bahwa manajemen puncak sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pengendalian intern.

Setiawan (2005) dengan judul pengaruh pengetahuan teknologi informasi yang dikuasai akuntan, pemanfaatan teknologi informasi dan faktor kesesuaian tugas teknologi terhadap kinerja akuntan internal dengan sampel perbankan baik pemerintah maupun bank swasta yang beroperasi di wilayah Pakanbaru, menemukan bukti empiris bahwa pengetahuan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi dan kesesuaian tugas teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja akuntan.

Mardjiono (2009) dengan judul pengaruh kepemimpinan, pemanfaatan teknologi informasi dan implementasi struktur organisasi yang terdesentralisasi terhadap kinerja organisasi yaitu RSUD, menemukan bukti empiris bahwa

pemanfaatan teknologi informasi, kepemimpinan dan struktur organisasi berpengaruh terhadap kinerja.

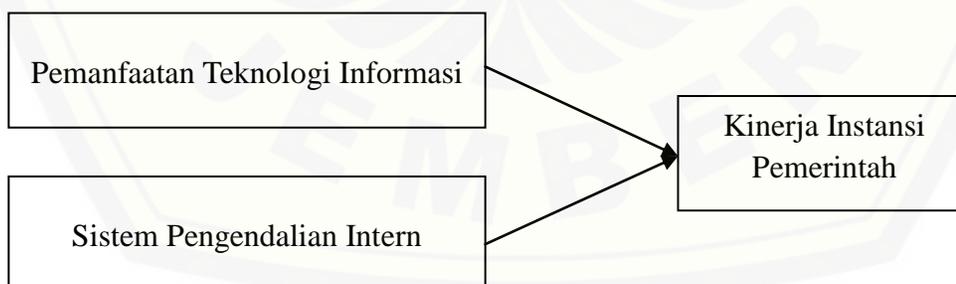
Prasetyo dan Kompyurini (2007) dengan judul analisis kinerja rumah sakit dengan pendekatan *balanced scorecard* berdasarkan komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan prinsip GCG, menemukan bukti empiris bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja RSUD.

Supardi (2004) dengan judul pengaruh dewan komisaris, formulasi strategi dan penerapan pengendalian intern serta pengembangan tata kelola perusahaan terhadap kinerja bisnis, menemukan bukti empiris bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja bisnis.

### 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel independen dan dependen. Sehingga secara skematis kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**



## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini sangat berkembang pesat. Perkembangan teknologi informasi kini tidak hanya untuk organisasi bisnis semata, akan tetapi teknologi informasi untuk organisasi sektor publik juga mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Salah satu manfaat yang diharapkan adalah seperti peningkatan kinerja yang merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan berdampak pada cara kerja pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan. Widiastuti (2011) melakukan penelitian dengan judul pengaruh teknologi informasi dan saling ketergantungan terhadap kinerja manajerial dengan karakteristik sistem akuntansi manajemen (SAM) sebagai variabel intervening (studi kasus pada layanan perbankan

milik daerah yang berada di Jawa Tengah dan DIY), ditemukan bukti empiris bahwa teknologi informasi berpengaruh positif tidak langsung dan dampak yang signifikan terhadap kinerja manajerial melalui sistem manajemen akuntansi.

Amalia (2010) melakukan penelitian dengan judul persepsi pegawai pajak terhadap pemanfaatan teknologi informasi pada kinerja individual (Studi kasus pada KPP Pratama Tegal), ditemukan bukti empiris pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja individual.

Mardjiono (2009) melakukan penelitian dengan judul analisis pengaruh kepemimpinan, pemanfaatan teknologi informasi dan implementasi struktur organisasi yang terdesentralisasi terhadap kinerja organisasi (Studi pada RSD Kabupaten Temanggung) ditemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah.

$H_1$  : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

## **2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi (PP No. 60 Tahun 2008). Pelaksanaan pengendalian dapat efektif apabila ada komitmen diantara pihak-pihak yang terkait dalam organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok. Hal ini dimaksudkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik.

Penelitian yang berhubungan dengan sistem pengendalian intern pada pemerintahan telah banyak dilakukan. Fawzi (2010) melakukan penelitian dengan judul pengaruh pengawasan intern dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintahan ditemukan bukti empiris bahwa (1) pengawasan intern, sistem informasi akuntansi dan kinerja pemerintahan pada Dinas yang berada di Kota

Tasikmalaya termasuk kategori yang sangat baik, (2) hubungan antara pengawasan intern dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja Dinas tergolong sangat kuat, (3) terdapat pengaruh signifikan secara parsial maupun simultan pengawasan intern dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintahan.

Prasetyo dan Kompyurini (2007) melakukan penelitian dengan judul analisis kinerja rumah sakit daerah dengan pendekatan balanced scorecard berdasarkan komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) ditemukan bukti empiris komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja RSD, namun secara parsial komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja RSD.

Ginjar (2011) dengan judul pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah daerah ditemukan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh positif dari sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menduga bahwa terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah.

H<sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Husein, 2001). Jenis data yang dikumpulkan adalah opini subyek (orang) mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah.

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah metode *survey* dengan menggunakan kuisisioner yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kuisisioner yang digunakan adalah susunan berdasarkan dari faktor-faktor pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kinerja.

Penyebaran kuisisioner ini dilakukan dengan mendatangi satu-persatu calon responden, mengecek responden apakah memenuhi persyaratan sebagai responden, lalu menanyakan kesediaan dalam mengisi kuisisioner. Prosedur ini penting karena peneliti ingin menjaga kuisisioner diisi oleh responden yang memenuhi syarat mengisi dengan sungguh-sungguh.

Bentuk kuisisioner yang diberikan terdiri dari 2 bagian pertanyaan yang digunakan untuk mengungkap :

- 1) Identitas responden
- 2) Persepsi pegawai mengenai pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kinerja. Faktor persepsi yang digunakan adalah faktor fungsional yaitu kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal – hal lain yang termasuk ke dalam faktor – faktor personal dan faktor struktural yaitu berasal dari sifat stimuli fisik. Faktor perilaku yang digunakan adalah faktor personal yang terdiri dari faktor biologis, sosiopsikologis, dan faktor situasional yang terdiri dari aspek obyektif yaitu analisis suasana perilaku, faktor sosial, dan stimuli yang memperteguh perilaku terdiri dari orang lain dan situasi pendorong perilaku. Faktor – faktor yang digunakan dalam kuisisioner tersebut masing-

masing dijabarkan dalam beberapa pertanyaan. Teknik skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert* 5.

## 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah kepala bagian/sub bagian pada unit kerja yang ada pada setiap SKPD Kabupaten Jember.

Teknik penentuan sampel menggunakan *nonprobability sampling* berupa *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah kepala bagian/sub bagian pada unit kerja yang ada pada setiap SKPD Kabupaten Jember dan yang telah bekerja minimal satu tahun di jabatan yang sama karena sudah memiliki pengalaman dalam pekerjaan, sehingga pegawai yang dijadikan responden adalah pegawai yang sudah banyak mengerti mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi.

**Tabel 3.1 Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember**

No	Uraian	SKPD
1	Sekretariat Daerah	1
2	Sekretariat DPRD	1
3	Inspektorat	1
4	Dinas	30
5	Kantor/Badan Setingkat Dinas	12
6	Kelurahan	22
7	Kecamatan	31
	<b>Total</b>	<b>98</b>

Sumber data : <http://jemberkab.go.id/profil-skpd/dinas/>, 2013

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel sebagai berikut :

- 1) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah kinerja instansi pemerintah.
- 2) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern.

#### 3.3.1 Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Menurut Nordiawan (2010:85) indikator kinerja adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator. Skala yang digunakan adalah *Likert* dengan 5 point, dalam hal ini penelitian terhadap responden diberi skor 1 – 5 dengan ketentuan :

- 1 = Sangat Jauh Dibawah Rata-Rata
- 2 = Dibawah Rata-Rata
- 3 = Rata-Rata
- 4 = Diatas Rata-Rata
- 5 = Sangat Jauh Diatas Rata-Rata

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah diadopsi dari Mahoney (1963) dalam Nizar dan Oktari (2010) :

- 1) Perencanaan
- 2) Pengkoordinasian
- 3) Evaluasi
- 4) Pengawasan
- 5) Pemilihan staff
- 6) Kinerja secara menyeluruh

### **3.3.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikan dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupu kinerja individu yang bersangkutan. Menurut Jurnal dan Supomo (2002) pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Skala yang digunakan adalah *Likert* dengan 5 point, dalam hal ini penelitian terhadap responden diberi skor 1 – 5 dengan ketentuan:

- 5 = Sangat Setuju (SS)
- 4 = Setuju (S)
- 3 = Kurang Setuju (KS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Indikator yang digunakan antara lain (dalam Nizar dan Oktari, 2010):

- 1) Dimensi sasaran yaitu di dukung oleh proyek bidang teknologi informasi, telaah terhadap peluang yang diberikan teknologi informasi, informasi yang memadai tentang penggunaan teknologi informasi gambaran cakupan serta kualitas teknologi informasi yang digunakan dan perancangan proyek teknologi informasi yang diprioritaskan.
- 2) Dimensi pertanggungjawaban dan otoritas indikatornya antara lain operasionalisasi mengenai arah dan pengembangan teknologi informasi secara jelas diungkapkan, proyek bidang teknologi informasi telah benar-benar ditelaah

dan monitoring terhadap kinerja dan fungsi teknologi informasi. Selanjutnya indikator fungsi bagian teknologi informasi adalah memiliki fungsi dan tujuan yang jelas, memiliki kriteria penilaian yang jelas.

- 3) Dari pengguna teknologi informasi indikatornya adalah memberikan pendapat sebagai perhatian dalam perencanaan dan penerapan teknologi informasi, memahami semua jenis kebijakan, struktur teknologi informasi sesuai dengan struktur organisasi, hubungan ahli teknologi informasi dan pemakai teknologi informasi konstruktif, dan indikator dari dimensi proses antara lain perencanaan *top down* untuk mengaitkan antara sistem informasi dan kebutuhan kantor pimpinan berpendapat bahwa eksploitasi di bidang teknologi informasi akan datang merupakan kepentingan strategis, sumber-sumber pengembangan teknologi informasi baru yang ada dalam setiap tingkatan bagian kerja dilakukan pengawasan.

### 3.3.3 Sistem Pengendalian Intern

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keadilan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Skala yang digunakan adalah *Likert* dengan 5 point, dalam hal ini penelitian terhadap responden diberi skor 1 – 5 dengan ketentuan :

- 5 = Sangat Setuju (SS)
- 4 = Setuju (S)
- 3 = Kurang Setuju (KS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Indikator yang digunakan dalam mengukur pengendalian intern adalah (dalam Nizar dan Oktari, 2010) :

1) Dilihat dari dimensi lingkungan pengendalian

Penegakan integritas, nilai etika, komitmen, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2) Dari dimensi penilaian risiko

Tujuan instansi pemerintah, tujuan pada tingkatan kegiatan, identifikasi resiko, dan analisis resiko.

3) Kegiatan pengendalian

Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas indikator dan ukuran kinerja pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting, serta indikator informasi, komunikasi dan pemantauan.

## **3.4 Metode Analisis Data**

### **3.4.1 Metode Analisis Data**

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan keadaan lapangan secara deskriptif dengan menginterpretasikan hasil tabulasi data. Analisis deskriptif ini diharapkan dapat mendukung hasil analisis penelitian, sehingga dapat menggambarkan secara lebih rinci mengenai hasil temuan penelitian. Selain itu analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan teknologi informasi

dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah secara simultan dan parsial.

## 3.4.2 Pengujian Kualitas Data

### 1) Pengujian Validitas Data

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang ada (disusun) valid atau tidak (Ghozali, 2002). Hasil pengujian validitas ditunjukkan oleh suatu indeks yang menjelaskan seberapa jauh suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Dengan kata lain suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Uji validitas bertujuan untuk melihat ketepatan instrumen pengukur dalam penelitian. Pengujian ini untuk mengetahui ketepatan instrumen penelitian agar dapat memberikan informasi yang akurat tentang hal yang diukur.

Uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor variabel melalui program SPSS. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Teknik yang digunakan untuk pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi *product moment pearson* dengan menggunakan SPSS 17.0 for windows Uji Reliabilitas

### 2) Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang telah melalui pengujian validitas dan yang dinyatakan valid. Pengujian ini untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran terhadap item-item pertanyaan apakah tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Hasil pengujian reliabilitas ditunjukkan dalam suatu indeks yang menjelaskan seberapa jauh suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Teknik yang digunakan untuk pengujian reliabilitas adalah *Cronbach Alpha*. Teknik ini dikembangkan oleh *Cronbach* untuk menghasilkan korelasi reliabilitas alpha, dan merupakan teknik pengujian konsistensi reliabilitas antara item-item yang terpopuler serta menunjukkan indeks konsistensi yang sempurna. Dasar pengambilan keputusan yaitu apabila nilai *Alpha Cronbach*  $> 0,6$ .

### 3.4.3 Pengujian Asumsi Klasik

Untuk memperoleh nilai pengukuran yang tidak bias dari persamaan regresi linier berganda, maka perlu diadakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi layak dipakai atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini tidak digunakan uji autokolerasi karena uji autokolerasi digunakan pada regresi yang datanya adalah *time series* atau berdasarkan waktu berkala seperti bulanan, tahunan, dan seterusnya Arikunto (2002:216). Berikut ini dijelaskan lebih lanjut mengenai uji asumsi klasik.

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi data normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi normal, maka garis yang menggambarkan dan sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006).

#### 2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a) Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel – variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- b) Menganalisis matrik korelasi variabel – variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.
- c) Multikolinieritas dapat dilihat juga dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya, (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih dan tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai  $tolerance < 0.10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ . Setiap penelitian harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai  $tolerance = 0.10$  sama dengan tingkat kolinieritas 0.95. Namun, walaupun demikian tetap saja tidak diketahui variabel – variabel independen mana sajakah yang saling berkorelasi (Ghozali, 2006:91).

### 3) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas, Ghozali (2006:105). Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di – studentize. Dasar analisis yaitu :

- Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit). Maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas

- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.4.4 Analisis Kuantitatif

#### 1) Analisis Regresi

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda (*multiple regression*) dengan bantuan komputer melalui SPSS 17.0 for windows.

Bentuk umum persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	=	Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
a	=	Konstanta
X <sub>1</sub>	=	Pemanfaatan Teknologi Informasi
X <sub>2</sub>	=	Sistem Pengendalian Intern
b <sub>1-2</sub>	=	Koefisien regresi
e	=	Standar error

#### 2) Uji R<sup>2</sup>

R<sup>2</sup> adalah perbandingan antara variasi yang dijelaskan oleh X1 dan X2 secara bersama-sama dibanding dengan variasi total Y. Jika selain X1 dan X2 semua variabel di luar model yang diwadahi dalam e dimasukkan ke dalam model, maka nilai R<sup>2</sup> akan bernilai 1. Ini berarti seluruh variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Tidak ada ukuran yang pasti berapa besarnya R<sup>2</sup> untuk mengatakan bahwa suatu pilihan variabel sudah tepat. Jika R<sup>2</sup> semakin besar atau mendekati 1, maka model makin tepat. Untuk data survai yang berarti bersifat *cross section* data yang diperoleh dari banyak responden pada waktu yang sama, maka nilai R<sup>2</sup> = 0,2 atau 0,3 sudah cukup baik. Semakin besar n (ukuran sampel) maka nilai R<sup>2</sup> cenderung semakin kecil. Sebaliknya dalam data runtun waktu (*time series*) dimana peneliti mengamati hubungan dari beberapa variabel pada suatu unit analisis (perusahaan atau negara) pada beberapa tahun maka R<sup>2</sup> cenderung besar, hal ini disebabkan variasi

data yang relatif kecil pada data runtun waktu yang terdiri dari satu unit analisis saja (Gujarati, 1995:75).

### 3) Uji F (*Goodness of fit*)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pemodelan yang dibangun memenuhi kriteria fit atau tidak. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel} (a, k-1, n-1)$ , maka  $H_0$  ditolak artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel} (a, k-1, n-k)$ , maka  $H_0$  diterima artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan

Pada output regresi, uji F juga dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas dengan  $\alpha$  yang ditentukan, dengan demikian apabila hasil perbandingan menunjukkan bahwa nilai probabilitas  $(0,000) < \alpha (0,05)$  dapat dikatakan bahwa permodelan yang dibangun memenuhi kriteria fit (Ghozali, 2006).

### 4) Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Tujuan dari uji  $t$  adalah untuk menguji koefisien regresi secara individual. Nilai  $t_{tabel}$  yang diperoleh dibandingkan nilai  $t_{hitung}$ , bila  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel independent berpengaruh pada variabel dependent.

Kriteria pengujian :

- Apabila nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan
- Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan

## BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Jember. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh langsung terhadap kinerja instansi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi maka semakin tinggi kinerja instansinya. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kinerja instansi.
- b. Sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi SKPD. Sehingga semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah maka akan semakin tinggi pula kinerja instansi pemerintah. Sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

### 5.2 Keterbatasan

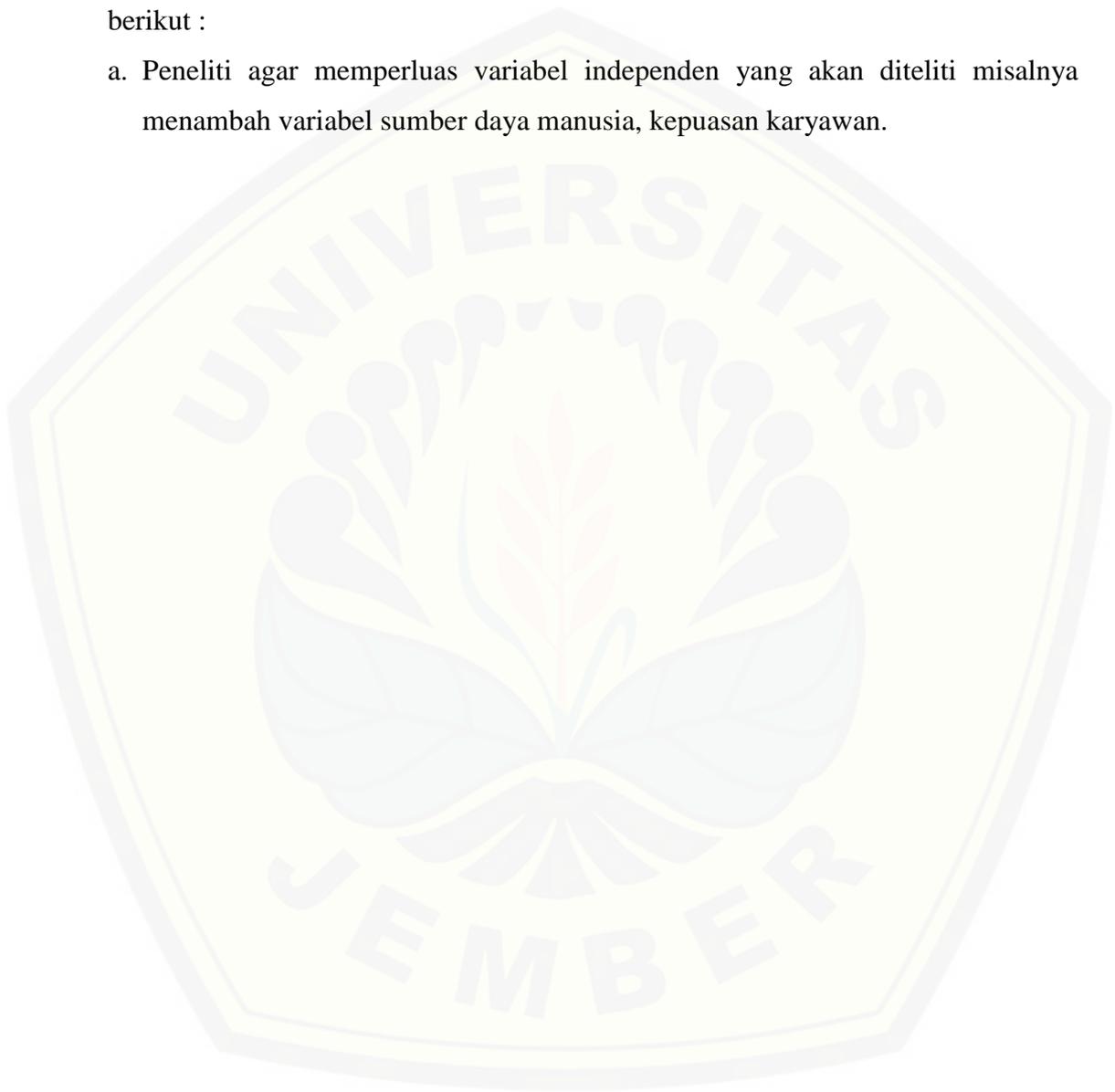
Walaupun penelitian ini telah dilakukan dengan baik, namun beberapa keterbatasan terpaksa tidak dapat dihindari. Seperti penelitian-penelitian sebelumnya, perlu kehati-hatian dalam melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian. Berikut ini beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mengganggu hasil penelitian ini :

- a. Penulis hanya meneliti dua variabel bebas yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi. Diduga masih ada faktor lain yang dapat diteliti yang berpengaruh terhadap kinerja instansi misalnya variabel sumber daya manusia, kepuasan kerja.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember, penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Peneliti agar memperluas variabel independen yang akan diteliti misalnya menambah variabel sumber daya manusia, kepuasan karyawan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Aji, Supriono. 2005. *Pengantar Teknologi Informasi*. Semarang : Salemba Infotik.
- Amalia, Soraya. 2010. Persepsi Pegawai Pajak Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Kinerja Individual (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tegal). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Fawzi, Anggi. (2010). Pengaruh Pengawasan Intern dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Pemerintah. (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tasikmalaya). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ginanjari, Asep Gigin. (2011). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Padjajaran.
- Gujarati, Damodar, 1995. *Ekonometrika Dasar*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Jalaluddin dan Ibad Khairul. (2010). Pengaruh Environment Control (Studi Empiris pada SKPD Di Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Vol. 3. No. 1. Tahun 2010 Hal. 84-99. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Mardjiono, Didik Eko. 2009. Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Pemanfaatan Teknologi, dan Implementasi Organisasi yang Terdesentralisasi Terhadap Kinerja Organisasi, Studi Pada RSUD Kabupaten Temanggung. *Tesis*. Universitas Padjajaran.
- Mahsu, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFY Yogyakarta.
- Nazir, Azwir dan Oktari, Rianti. (2010). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten Kampar). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Riau.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

O'Brein, James. A. 2006. *Pengantar Teknologi Sistem Informasi Perspektif Bisnis Manajerial*. Jakarta : Salemba Empat.

Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan Pada Instansi Pemerintah. BPKP 2000

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah. BPK RI. 2006.

Prasetyo, Kompyurini Nurul. 2007. Analisis Kinerja Rumah Sakit Daerah Dengan Pendekatan *Balanced Scorecard* Berdasarkan Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Simposium Nasional Akuntansi X. Universitas Hasanudin.

Rahadi, Dr. Dedi Rianto. 2007. Peranan Teknologi Infromasi dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik. *Seminar Nasional Teknologi 2007 (SNT 2007) Yogyakarta, 24 November 2007*. Universitas Bina Darma.

Setiawan, Imran. 2005. Pengaruh Pengetahuan Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi Terhadap Kinerja Akuntan. *Skripsi*. Universitas Riau: Pekanbaru.

Tjai Fung Jin. 2003. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 5(1) : 1 – 26.

Tugiman, Hiro. 2000. Pengaruh Peran Auditor Internal Serta Faktor-Faktor Pendukungnya Terhadap Peningkatan Pengendalian Internal dan Kinerja Perusahaan. *Disertasi Doktor*. Universitas Padjajaran : Bandung.

Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Penerbit : Andi. Yogyakarta.

Widiastuti, Kiki. 2011. Pengaruh Teknologi Informasi dan Saling Ketergantungan Terhadap Kinerja Manajerial dengan Karakteristik Sistem Akunatansi Manajemen (SAM) Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Perbankan Milik daerah yang Berada di Jawa Tengah dan DIY). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Wijana, Nyoman. 2007. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya Pada Kinerja Individual pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Bali.

Winidyaningrum, Celviana & Rahmawati. (2010). *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subokawonosraten)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.

<http://jemberkab.go.id/profil-skpd/dinas>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2013

<http://www.caleg-indonesia.com/2013/09/jember-siap-bertransformasi-menjadi.html>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2013



**KUISIONER PENELITIAN**

**A. Demografi Responden**

Nama Instansi : -----

Nama Responden : -----

Tanggal Pengisian : -----

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan

Latar Belakang Pendidikan :

Ekonomi / Akuntansi

Hukum

Teknik

Sosial

Lainnya

Pendidikan Terakhir :

SLTA / Sederajat

Diploma (D3)

Strata 1 (Sarjana)

Strata 2 (Master)

Strata 3 (Doktor)

Jabatan :

Kepala Badan/Dinas/Instansi

Sekretaris/Kabid/Kabag

Kasubid/Kasubbag/Kasubdis/Kasie

Lama Bekerja :

1 – 3 tahun

4 – 6 tahun

7– 9 tahun

> 9 Tahun

**B. Kinerja Instansi Pemerintah**

Bagian ini untuk mengukur kinerja instansi yang Bapak/Ibu tempati. Dalam menjawab pertanyaan bagian ini Bapak/Ibu diminta untuk menyesuaikan jawabannya dengan luas kewenangan dan tanggungjawab Bapak/Ibu

ketersediaan informasi pada unit/sub unit Bapak/Ibu dan besarnya perhatian organisasi kepada Bapak/Ibu. Penjelasan sebagai berikut :

- 1 = Sangat Jauh Dibawah Rata-Rata
- 2 = Dibawah Rata-Rata
- 3 = Rata-Rata
- 4 = Diatas Rata-Rata
- 5 = Sangat Jauh Diatas Rata-Rata

No	Bidang	Pernyataan	Skor				
			1	2	3	4	5
1	<i>Perencanaan</i>	Menentukan tujuan, kebijakan dan tindakan/pelaksanaan, penjadwalan kerja, penganggaran, merancang prosedur pemrograman					
2	<i>Pengkoordinasian</i>	Tukar menukar informasi dengan orang di bagian organisasi lain untuk mengaitkan dan menyesuaikan program, memberitahu SKPD lain					
3	<i>Evaluasi</i>	Menilai dan mengukur proposal, kinerja yang diamati atau dilaporkan : penilaian pegawai, penilaian catatan, penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan					
4	<i>Pengawasan</i>	Mengarahkan, memimpin dan mengembangkan bawahan Bapak/Ibu : membimbing, melatih dan menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, memberikan tugas pekerjaan dan menangani keluhan					
5	<i>Pemilihan Staff</i>	Mempertahankan angkatan kerja dibagian Bapak/Ibu : merekrut, mewawancarai dan memilih pegawai baru, menempatkan, mempromosikan dan memutasi pegawai					
6	<i>Kinerja Secara Menyeluruh</i>	Kinerja instansi secara menyeluruh					

### C. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jawaban atas pertanyaan berikut ini dapat digunakan untuk menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi. Mohon Anda menjawab pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu angka, dari angka 1 hingga angka 5. Skala nomor menunjukkan seberapa dekat jawaban Anda dengan kedua pilihan yang tersedia. Penjelasan sebagai berikut :

- 1 = Sangat Tidak setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Pernyataan	Skor				
	1	2	3	4	5
1. Sebaiknya setiap pegawai memiliki komputer untuk melaksanakan tugas					
2. Sebaiknya terdapat jaringan internet dalam kantor agar dapat dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibuthkan serta dapat mempercepat proses informasi terutama dalam menyalurkan informasi keuangan daerah					
3. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi					
4. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi					
5. Dengan adanya penggunaan teknologi informarmasi diharapkan koordinasi antar unit dalam organisasi dapat berjalan dengan cepat dan tepat sehingga kinerja organisasi secara umum dapat meningkat					

#### D. Sistem Pengendalian Intern

Jawaban atas pertanyaan berikut ini dapat digunakan untuk menjelaskan sistem pengendalian intern. Mohon Anda menjawab pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu angka, dari angka 1 hingga angka 5. Skala nomor menunjukkan seberapa dekat jawaban Anda dengan kedua pilihan yang tersedia. Penjelasannya sebagai berikut :

- 1 = Sangat Tidak setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Pernyataan	Skor				
	1	2	3	4	5
1. Standard operating procedure (SOP) sebaiknya dibuatkan untuk penyelenggaraan kegiatan pengelola anggaran					
2. Suatu kegiatan atau transaksi sebaiknya dilakukan pemisahan wewenang secara tepat					
3. Setiap transaksi yang terjadi harus didukung oleh bukti transaksi yang valid dan sah					
4. Sebaiknya terdapat tindakan disiplin yang tepat apabila terjadi penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku					
5. Sebaiknya terdapat pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses					
6. Sebaiknya terdapat langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer					